

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002022117097, 31 Desember 2022

## Pencipta

Nama : **Stefanus Sampe**  
Alamat : Perum Kombos Permai Blok C-10, Kombos Timur, Singkil, Manado, MANADO, SULAWESI UTARA, 95234  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Stefanus Sampe**  
Alamat : Perum Kombos Permai Blok C-10, Kombos Timur, Singkil, Manado, MANADO, SULAWESI UTARA, 95234  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Pidato**  
Judul Ciptaan : **Kewenangan Partai Politik Di Tingkat Lokal Dalam Pemilihan Pemerintahan Daerah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Desember 2016, di Manado

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000432841

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

ORASI ILMIAH

**“Kewenangan Partai Politik di Tingkat Lokal  
dalam Pemilihan Pemerintahan Daerah”**

Oleh:

**Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol., Ph.D**



DALAM RANGKA DIES NATALIS KE 52  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**Manado, 20 Desember 2016**



Salam sejahtera bagi kita semua, Syalom

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat,

- Rektor Universitas Sam Ratulangi
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi
- Para Pembantu Rektor, Para Direktur/Ketua/Kepala Lembaga se-Universitas Sam Ratulangi
- Para Dekan se-Universitas Sam Ratulangi
- Para Wakil Dekan FISIP Unsrat
- Para Pimpinan Jurusan
- Para Dosen, Staf Administrasi dan Mahasiswa
- Panitia Dies Natalis FISIP Unsrat ke 52
- Para Tamu, Undangan dan Hadirin yang saya hormati

Pertama-pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Mahakuasa, karena atas tuntunanNya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Dies Natalis ke 52 FISIP Unsrat yang kita banggakan ini. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih kepada Panitia Dies Natalis dan Dekan FISIP Unsrat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah.

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

### **Kewenangan Partai Politik di Tingkat Lokal dalam Pemilihan Pemerintahan Daerah**

Hadirin yang saya hormati,

Sejak kejatuhan rejim Soeharto tahun 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan politik yang signifikan selama proses demokratisasi. Dibandingkan dengan era otoriter, warganegara sekarang dapat menjalankan hak-hak politik mereka seperti hak mengekspresikan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dalam pemerintahan, hak memilih dengan bebas, dan hak membentuk organisasi dan partai politik. Peningkatan

jumlah partai politik sejak era demokratisasi juga telah memberikan kepada warganegara Indonesia pilihan politik yang lebih besar dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Lebih lanjut lagi, desentralisasi politik diterapkan untuk memperkuat proses demokratisasi dengan membawa proses pembuatan keputusan ke tingkat lokal (Turner et al. 2003).

Perubahan-perubahan politik yang signifikan setelah kejatuhan rejim otoriter ini telah menyebabkan perhatian terhadap studi-studi dan penelitian-penelitian tentang partai politik di Indonesia meningkat tajam. Pencabutan pembatasan jumlah partai politik dari rejim otoritarian telah mendorong terbentuknya partai-partai politik yang baru dan menyebabkan penambahan jumlah partai-partai politik yang begitu cepat (Anwar 1999, pp. 40-1; McBeth 1999, p. 26). Partai-partai politik bertumbuh dengan cepat seperti ‘jamur-jamur di tanah yang subur’ di era baru demokrasi di Indonesia (Schwarz 1999, p. 309). Meskipun demikian, masih sedikit literature dan penelitian yang berfokus pada hubungan kekuasaan di dalam partai-partai politik (antara pusat dan daerah) di Indonesia. Orasi ini mencoba mengisi kelangkaan literature tentang partai-partai politik di negara-negara berkembang dalam konteks desentralisasi dengan menguraikan bagaimana hubungan antara partai politik di daerah dengan kantor pusat mereka dan otonomi apa yang mereka miliki selama pemilihan kepala daerah berlangsung. Orasi ini memfokuskan pada kewenangan yang dimiliki oleh partai-partai politik di tingkat lokal pada pemilihan walikota Manado 2010.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk membahas lebih mendalam tentang hubungan antara partai politik di pusat dengan cabang-cabangnya di tingkat lokal, ada baiknya kita melihat konsep ‘veto player’ yang saya gunakan sebagai suatu landasan teori dalam orasi ini. Konsep ‘veto player’ bukan suatu idea yang baru. Konsep ini berakar dari ‘ide ‘*checks and balances*’ dalam konstitusi Amerika Serikat dan teks-teks konstitusional abad delapan belas’ (Tsebelis 1995, p. 301). Meskipun demikian, konsep ‘veto player’ berguna dalam menyediakan suatu alat analitis bagi studi-studi politik saat ini. Penelitian dari Tsebelis’s (2002), sebagai contoh, menggunakan konsep ‘veto player’ ini untuk menganalisa pengaruh lembaga-lembaga politik terhadap kebijakan publik.

Di dalam penelitiannya, Tsebelis (1995, p. 301) mendefenisikan ‘veto player’ sebagai ‘suatu individu atau aktor kolektif yang persetujuannya (dengan kekuasaan mayoritas bagi

aktor kolektif) wajib diperlukan untuk suatu perubahan kebijakan'. Veto player memberikan hak istimewa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang dibuat oleh aktor-aktor lain disetujui atau tidak. Tsebelis (1995) mengklasifikasikan 'veto players' ke dalam dua jenis: (1) 'veto player' lembaga yang diberikan oleh konstitusi seperti presiden dan majelis-majelis dalam parlemen; dan (2) veto player partisan yang ditentukan oleh permainan politik seperti partai-partai politik yang menjalankan pemerintahan. Memang, partai-partai politik adalah veto players di dalam sistem politik. Veto player berfungsi sebagai suatu mekanisme keseimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga politik dalam sistem politik. Konsep 'veto player' memberikan kekuatan kepada lembaga-lembaga politik untuk membatalkan keputusan dari lembaga lain di dalam proses legislasi (Tsebelis 1995, p. 290). Meskipun demikian, penelitian Tsebelis' (1995) lebih fokus pada konsep 'veto player' di dalam sistem politik daripada di dalam organisasi-organisasi partai politik itu sendiri.

Konsep 'veto player' digunakan di dalam pembahasan ini tetapi disesuaikan dengan konteks Indonesia. Konsep 'veto player' di dalam pembahasan ini diterapkan secara internal di dalam partai-partai politik untuk mengerti kewenangan pembuatan keputusan di antara berbagai tingkatan berbeda di dalam struktur-struktur partai-partai politik, khususnya pengurus pusat dan pengurus daerah. Pengurus pusat memiliki kekuasaan terhadap keputusan-keputusan yang paling penting di dalam partai, seperti memilih kandidat untuk bertarung dalam pemilihan. Sebagaimana dikatakan oleh Michels (1962, p. 78), organisasi-organisasi partai memiliki kecenderungan-kecenderungan oligarki dan sentralistik. Pengurus pusat dapat memveto kandidat-kandidat yang dipilih pada tingkat lokal. Kewenangan memveto yang dipegang oleh elit-elit partai politik pusat 'memberikan mereka sebuah hak istimewa akan karakter dasarnya yang oligarkis' (Michels 1962, p. 127). Pengurus pusat, meskipun demikian, umumnya tidak menggunakan kekuatan ini dalam penentuan teknik-teknik kampanye pada pemilihan lokal. Organisasi-organisasi partai lokal didelegasikan kewenangan untuk memilih taktik dan aktivitas kampanye sendiri.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai perpanjangan struktur organisasi partai-partai politik nasional, partai-partai politik di Kota Manado memiliki tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka oleh kantor pusat partai mereka. Tanggung jawab yang didesentralisasikan oleh kantor pusat partai kepada kantor cabang partai antara lain meliputi menyeleksi kandidat, mengorganisir koalisi

dan mengatur kampanye. Meskipun demikian, desentralisasi tanggung jawab ini masih dimonitor oleh kantor pusat partai yang mana masih memegang hak veto terhadap keputusan-keputusan yang dibuat pada tingkat lokal. Kekuatan veto ini telah digunakan oleh beberapa pengurus pusat partai politik dalam pemilihan walikota 2010 di Manado.

Dengan memegang hak veto ini, pengurus pusat partai dapat merubah keputusan yang tidak diinginkan oleh mereka yang dibuat oleh pengurus daerah mereka. Hal ini secara khusus terjadi pada penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Persetujuan dari pengurus pusat partai diperlukan di dalam penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Menurut data interview yang dikumpulkan tahun 2012 dan pengamatan di tahun 2010 nampak bahwa dalam pilwako 2010 di Manado sebagian besar kandidat yang diseleksi di tingkat lokal tidak memperoleh persetujuan dari pengurus pusat partai yang mana merubah nominasi ke kandidat-kandidat lain yang diinginkan oleh pengurus pusat. Perubahan-perubahan strategis ini menyebabkan partai-partai politik di Kota Manado perlu mempertimbangkan kembali dan me'lobby' partai politik lain di daerah untuk membentuk koalisi. Pengurus pusat atau daerah dari partai-partai yang lain yang sebelumnya mendukung nominasi lokal hasil koalisi sering menarik dukungan terhadap kandidat yang ditunjuk oleh pengurus pusat dari partai koalisi mereka. Ini mengharuskan partai-partai di daerah mencari beberapa partai koalisi yang baru untuk menominasikan kandidat mereka. Kurang kuatnya ideologi partai, khususnya di tingkat lokal, memudahkan pembentukan koalisi baru dengan partai-partai yang lain.

Lebih lanjut lagi, perubahan-perubahan strategis yang dilakukan oleh pengurus pusat partai sering menimbulkan konflik internal di dalam partai politik. Anggota dan pemimpin partai di tingkat lokal kadangkala tidak puas dengan kandidat yang ditentukan oleh pengurus pusat mereka (Pratikno 2009, p. 68). Anggota dan pemimpin partai yang tidak puas demikian adakalanya memilih untuk mundur dari aktivitas partai selama proses pemilihan kepala daerah atau bahkan mundur dari keanggotaan partai mereka (Choi 2009, p. 93). Hal ini menyebabkan pengurus lokal partai tersebut harus berusaha mencari dan merekrut anggota-anggota yang lebih banyak untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan oleh anggota-anggota pengurus yang tidak puas dengan keputusan pengurus pusat dalam hal penentuan kandidat.

Pengurus pusat partai agak sedikit mengintervensi dalam urusan kampanye daripada dalam penentuan kandidat dan membentuk koalisi dalam pilwako 2010 di Manado. Pengurus pusat partai menyerahkan pilihan taktik kampanye kepada pengurus lokal partai. Meskipun demikian, pemimpin-pemimpin pusat partai kadangkala terlibat di dalam kampanye-kampanye

untuk menarik masyarakat untuk memilih kandidat partai mereka dalam pemilihan kepala daerah. Umumnya, dapat dikatakan bahwa desentralisasi kewenangan dari pengurus pusat partai ke pengurus partai di daerah adalah bersyarat. Keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan seleksi kandidat dan membentuk koalisi terdesentralisasi hanya sejauh pengurus pusat partai menyetujui keputusan-keputusan di tingkat lokal. Pengurus pusat memegang kekuatan veto di dalam seleksi kandidat dan membentuk koalisi dan dapat, jika itu diinginkan, mengesampingkan keputusan-keputusan pengurus di daerah mengenai strategi dan taktik kampanye (Tsebelis 1995, 2002). Meskipun demikian, urusan kampanye dilihat sebagai yang terbaik didesain dan diterapkan oleh aktor-aktor partai politik di daerah sehingga membuat hal ini tidak biasa diintervensi oleh pengurus pusat. Mengintervensi urusan kampanye ini dilihat oleh pengurus pusat sebagai hal yang tidak strategis karena semua partai menggunakan taktik dan strategi yang sama hanya perbedaan utamanya pada penekan kampanye tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri pidato ini, perkenankan saya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, partai-partai politik di Kota Manado memiliki desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan yang terbatas dalam memilih kandidat dan membentuk koalisi pada pilwako 2010 karena kantor pusat mereka masih memegang dan menggunakan hak veto untuk merubah keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh mereka di tingkat lokal dalam pemilihan kepala daerah. Partai-partai politik di Kota Manado harus memiliki persetujuan dari pengurus pusat mereka untuk dapat menominasikan kandidat-kandidat bersaing dalam pilwako 2010.

Kedua, desentralisasi hanya berlangsung di tingkatan pemerintahan tetapi tidak di dalam partai politik. Partai-partai politik di Indonesia masih tersentralisir di tingkat pusat. Hal ini menyebabkan proses demokratisasi belum berjalan sepenuhnya. Desentralisasi administratif mengalami lebih banyak kemajuan daripada desentralisasi politik. Memang, masyarakat lokal diberi hak untuk memilih calon kepala daerahnya di dalam pemilihan pemerintahan daerah, tetapi pilihan-pilihan kandidat yang bersaing dalam pilkada itu ditentukan secara tersentralistik oleh partai politik di tingkat pusat. Karena itu ke depan perlu ada aturan yang menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat lokal tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Semoga

Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah orasi ilmiah saya, terima kasih atas perhatian. Proficiat Dies Natalis FISIP Unsrat ke 52. Selamat Natal 2016 Semoga damai dan sukacita natal Yesus Kristus menaungi hati kita dan menjadi terang bagi keluarga kita dan sesama.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syaloom



## Daftar Pustaka

- Anwar, DF 1999, 'The Habibie presidency', In G Forrester (ed), *Post-Soeharto Indonesia: renewal or chaos?*, Crawford House Publishing, Bathurst NSW, pp. 33-47.
- Choi, N 2009, 'Batam's 2006 mayoral election: weakened political parties and intensified power struggle in local Indonesia', In M Erb & P Sulistiyanto (eds), *Deepening democracy in Indonesia? direct elections for local leaders (pilkada)*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, pp. 74-100.
- McBeth, J 1999, 'Political update', In G Forrester (ed), *Post-Soeharto Indonesia: renewal or chaos?*, Crawford House Publishing, Bathurst NSW, pp. 21-32.
- Michels, R 1962, *Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*, The Free Press, New York.
- Pratikno, 2009, 'Political parties in pilkada: some problems for democratic consolidation', In M Erb & P Sulistiyanto (eds), *Deepening democracy in Indonesia? direct elections for local leaders (pilkada)*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, pp. 53-73.
- Schwarz, A 1999, *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*, Allen & Unwin, Sydney.
- Tsebelis, G 1995, 'Decision making in political systems: veto players in presidentialism, parliamentarism, multicameralism and multipartyism', *British Journal of Political Science*, vol. 25, no. 3, pp. 289-325.
- Tsebelis, G 2002, *Veto players: how political institutions work*, Princeton University Press, Princeton.
- Turner, M, Podger, O, Sumardjono, M & Tirthayasa, WK 2003, *Decentralisation in Indonesia: redesigning the state*, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra

## Curriculum Vitae

Nama : Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol., Ph.D  
TTL : Manado, 12 September 1973  
Pekerjaan : - Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP UNSRAT  
- Dosen Pascasarjana UNSRAT  
Pangkat/Gol. : Penata tkt I/III d  
Jab. Fungsional : Lektor  
Pendidikan : - Doctor of Philosophy, Ph.D in Government (University of Canberra, Australia)  
- Master of Public Policy (the Australian National University, Australia)  
- Graduate Diploma in Public Administration (the Australian National University, Australia)  
- Sarjana Sosial (Administrasi Niaga, FISIP Universitas Sam Ratulangi, Indonesia)  
- Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Minahasa  
- SMA Seminari St. Fransiskus Xaverius Kakaskasen, Tomohon  
- SMP Frater Don Bosco, Manado  
- SD Katolik IV St. Yohanes, Manado  
- TK Malaikat Pelindung, Manado  
Isteri : Helen Tambengie, SE., Ak., MSi  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kota Manado  
Anak-anak : - Farrell Athanasius Sampe (SD Frater Don Bosco Manado, kls 5)  
- Darrell Ignasius Sampe (SD Frater Don Bosco Manado, kls 2)  
Nomor HP : 0852 4013 2909

### Pengalaman Kerja

- Dosen FISIP, Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2006 – sekarang)
- Kepala Perpustakaan Unika De La Salle, Manado (2006 - 2007)
- Asisten Dosen Fakultas Ekonomi, Unika De La Salle, Manado (2001- 2007)
- Asisten Kepala Perpustakaan Unika De La Salle, Manado (2000 - 2002)

### Seminar dan Pertemuan Ilmiah

- Indonesia Update Conference 2015, 18 – 19 September, Land and Development in Indonesia: searching for the people's sovereignty, ANU, Canberra Australia
- Indonesia Update Conference 2014, 19 – 20 September, The Yudhoyono Years: an assessment, ANU, Canberra Australia
- Hot Knowledge Conference 2013, Global Research, 4 - 5 November, University of Canberra, Australia
- Hot Knowledge Conference 2012, Communicating Research, 19 – 20 November, University of Canberra, Australia
- Indonesian Forum November 2012, University of Canberra, Australia
- Hot Knowledge Conference 2011, Communicate and Work It Up, 21 – 22 November, University of Canberra, Australia
- The Second Indonesian Next Conference, Building the Blue Print of Indonesia State, 12 – 14 May 2005, ANU, Canberra Australia

### Publikasi Ilmiah

- The transformation of legislative institution of Indonesia, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 5 Issue 11 November 2016
- What are the key principles in developing government 's social policy for children?, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 5 Issue 13 Desember 2016

### Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Sam Ratulangi (2016-sekarang)
- Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) ACT Canberra (2011-2012)
- Wakil Ketua DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Utara (2008-2011 dan 2012-2015)
- Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Manado (2007-2011)
- Wakil Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Sulawesi Utara (2007-2010)
- Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Manado (1999-2000)
- Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado (1997-1999)